JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 4727-4739
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Peradaban Islam pada Masa Dinasti Umayyah: Transformasi Politik, Sosial Budaya, dan Perkembangan Keilmuan

Khairun Nisa [a,1,*], Ainun Nisa [b,2]

[*a,b]Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
[1]khairunnisajn4@gmail.com; [2]ainunnisa1843@gmail.com
*Penulis Korespondensi; [1]khairunnisajn4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
12-09-2026
Revised:
05-10-2026
Accepted:
10-11-2026

Kata Kunci: Dinasti Umayyah, Transformasi Politik, Pola Interaksi, Peradaban Islam, Ilmu Pengetahuan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah peradaban Islam pada masa kepemimpinan Dinasti Umayyah, yang mencakup bidang politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta menganalisis pola interaksi antara umat Islam dengan masyarakat dan budaya di wilayah kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai literatur tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdirinya Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus menandai perubahan struktur pemerintahan dari sistem demokrasi pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi sistem monarki turun-temurun. Pada masa ini, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat yang ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan, reformasi administrasi melalui lembaga pemerintahan (Diwan), serta peningkatan sistem keamanan dan militer. Dalam bidang sosial budaya dan ilmu pengetahuan, muncul berbagai perkembangan penting dalam disiplin ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, fikih, dan nahwu, serta bidang arsitektur. Selain itu, pola interaksi antara umat Islam dan masyarakat lokal di wilayah-wilayah yang ditaklukkan diwujudkan melalui proses asimilasi budaya, penerapan kebijakan arabisasi, serta toleransi beragama yang tinggi terhadap penduduk non-Muslim (dzimmi), sehingga mendorong terciptanya keharmonisan sosial dalam wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Berdirinya Dinasti Umayyah diawali dengan penolakan terhadap pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pihak yang berseberangan melakukan perlawanan terhadap Ali melalui strategi politik dan mencapai perdamaian yang menguntungkan Dinasti Umayyah. Jatuhnya kekuasaan Ali dan naiknya Muawiyah I juga dipengaruhi oleh kaum Khawarij (kelompok yang tidak taat kepada Ali bin Abi Thalib), yang akhirnya membunuhnya. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Hasan bin Abi Thalib. Namun, karena situasi politik yang tidak stabil, Hasan hanya mampu memimpin selama beberapa bulan (Nasution, 1999).

Keputusan untuk mengangkat seorang pemimpin seharusnya diserahkan kepada umat Islam hingga akhirnya Hasan bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Keputusan ini menyatukan umat Islam di bawah satu pemimpin yang dikenal dengan istilah al-jama'ah dan secara tidak langsung mengubah struktur pemerintahan menjadi sistem monarki. Peristiwa ini terjadi pada tahun 661 M atau 41 H (Nurhakim, 2003).

Setelah runtuhnya masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan kemudian digantikan oleh Dinasti Umayyah. Muawiyah, sebagai khalifah pertama dinasti tersebut, mulai mengubah sistem pemerintahan dalam bidang politik dan pemerintahan, salah satunya melalui perluasan wilayah kekuasaan (Ahmad, 1990). Dalam bidang sosial budaya, hubungan komunikasi berkembang antara kerajaan-kerajaan Islam di Arab dengan peradaban wilayah yang ditaklukkan, seperti Eropa, Persia, dan Mesir, sehingga menghasilkan perpaduan budaya Islam Arab dengan tradisi bangsa lain (Manshur F. M., 2003). Sementara itu, dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan budaya, filsafat, dan ilmu pengetahuan di Damaskus pada masa ini berfokus pada beberapa bidang (Kulsum, 2021).

Selanjutnya, pola interaksi antarumat Islam yang muncul dapat dipahami melalui empat konsep, yaitu akomodasi, dengan memanfaatkan struktur yang sudah ada; arabisasi, melalui penyeragaman bahasa dan simbol kekuasaan; stratifikasi, melalui pembagian kedudukan sosial; dan akulturasi, melalui perpaduan unsur-unsur budaya (Lapidus, 2002). Dinamika ini perlu dikaji secara mendalam karena Dinasti Umayyah menjadi salah satu pilar utama dalam membawa perubahan di berbagai bidang sepanjang sejarah peradaban Islam. Dinasti ini tidak hanya mengubah sistem pemerintahan politik kekhalifahan menjadi sistem monarki, tetapi juga menata kembali struktur sosial budaya dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Kajian menyeluruh terhadap perubahan tersebut penting untuk memahami bagaimana peradaban Islam beradaptasi, berinteraksi, dan membentuk identitas baru di berbagai wilayah kekuasaannya yang semakin luas.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peradaban Islam pada masa kepemimpinan Dinasti Umayyah, khususnya dalam bidang politik, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Artikel ini juga bertujuan untuk memahami pola interaksi antara umat Islam dengan masyarakat dan budaya di wilayah kekuasaannya, dengan harapan pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai perjalanan yang dilalui umat Islam pada masa Kekhalifahan Umayyah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber literatur tertulis yang relevan dengan pokok bahasan Peradaban Islam masa dinasti umayyah.

Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Politik, Sosial Budaya dan Keilmuan Pada Masa Umayyah

1. Berdirinya Bani Umayyah

Sejak peristiwa tahkim terjadi pada masa perang Siffin, dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai berdiri saat itu. Ali bin Abi Thalib awalnya memenangkan konflik ini, yang dimaksudkan untuk membalas dendam atas pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan, tetapi Muawiyah meminta Ali untuk segera mematuhi aturan Allah SWT. (Thohir, 2004) Ali terjebak dalam perangkap Muawiyah oleh episode ini, dan strategi Muawiyah akhirnya menyebabkan kejatuhan politiknya. Sementara itu, Muawiyah berkesempatan mendeklarasikan dirinya sebagai raja sekaligus khalifah. (Nasution, 1999) Masyarakat Muslim mulai terpecah menjelang akhir pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib, dan tiga kekuatan politik yang sangat kuat Syiah, Muawiyah, dan Khawarij mulai berkembang. Nyatanya, hingga posisi Ali mulai terpuruk dan kekuatan Muawiyyah meningkat, keadaan tersebut tidak menguntungkan bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya pada tahun 660 M atau 40 H, seorang anggota Khawarij membunuh Ali Bin Abi Thalib.

Hasan menggantikan Ali sebagai khalifah setelah ayahnya meninggal. Namun, karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti yang mereka lakukan untuk Ali, Hasan kehilangan kekuatan, dan Muawiyah memperoleh kekuatan yang luar biasa. Pakta ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi pembantaian sampai Muawiyyah dan orang-orang Arab menandatangani perjanjian damai pada tahun 661 M atau 41 H Hasan. Umat Islam secara universal telah memutuskan bahwa hanya boleh ada satu khalifah, itulah sebabnya tahun ini disebut sebagai al-Jama'ah (tahun persatuan). Namun, Muawiyah menjadi satu-satunya penguasa setelah kapitulasi, yang juga menandai berakhirnya periode Rashidun Khulafaur dan runtuhnya sistem demokrasi yang digantikan oleh monarki (Keturunan). Setelah Rashidun Khulafarur, yang dimulai pada 661M/41H, sebuah dinasti Muslim yang dikenal sebagai Bani Umayyah muncul. (Nurhakim, 2003).

Ketika Umayyah bin Abd Syams bin Abdi Manaf melihat Nabi SAW dalam Abdi Manafnya, dia memberi Muawiyyah nama Bani Umayyah karena sejak nenek moyang Nabi dikenal sebagai Bani Hasyim, Muawiyyah dikenal sebagai Bani Hasyim. Kemudian, begitu Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, pemerintahan Muawiyah mengalami transformasi dari demokrasi menjadi sistem kerajaan (Kerajaan). Ketika dia kemudian menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus tahta, ini menjadi efektif. Mengingat bahwa ia meniru heriditas monarki yang dipraktikkan oleh Kekaisaran Romawi (Byzantium) dan Kekaisaran Persia, Muawiyah mengadopsi pendekatan ini. Setelah Muawiyah wafat pada tahun 671 M seterusnya dinasti Umayyah yang meneruskan kepemimpinan ialah keturunannya dan memiliki 14 Khalifah untuk dinasti Umayyah. Berikut adalah daftar nama-nama khalifah yang memerintah selama Dinasti Umayyah (Wahab, 2023).

1. Mu'awiyah bin Abu Sufyan (661-680 M)
2. Yazid bin Muawiyah (681-683 M)
3. Mu'awiyah bin Yazid (683-684 M)
4. Marwan bin Al-Hakam (684-685 M)
5. Abdul Malik bin Marwan (685-705 M)
6. Al Walid bin Abdul Malik (705-715 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (720-724 M)
8. Umar bin Abdul Aziz (717-720 M)
9. Yazid bin Abdul Malik (720-724 M)

10. Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M)
11. Walid bin Yazid (743-744 M)
12. Yazid bin Walid / Yazid II (744 M)
13. Ibrahim bin Malik (7 44 M)
14. Marwan bin Muhammad (745-750 M) (Rachman, 2018).

2. Peradaban Islam Era Bani Umayyah

a. Bidang Politik

Setelah masa Khulafaur Rasyidin runtuh, dan digantikan oleh Dinasti Umayyah. Muawiyah sebagai Khalifah pertama dinasti tersebut mulai mengubah tata kelola dari bidang politik dan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan umat dan mencegah serangan-serangan baik dari pihak musuh maupun ancaman pemberontakan dari dalam. Adapun kebijakan politik pada masa Dinasti Umayyah antara lain sebagai berikut:

Pertama, Perluasan Wilayah (Ekspansi): a) Era Umayyah dipandang sebagai masa ketika kerajaan berada pada puncak kejayaannya. Ini menunjukkan bahwa khalifah memiliki hasrat dan kerinduan akan dominasi dan kekuasaan. Ekspansi teritorial ini memuaskan kerinduan mendalam khalifah dan mengangkat bangsanya di mata kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada masa itu; b) Perluasan dan penaklukan wilayah hanya dapat dilakukan jika negara sudah mengalami stabilitas. Umat Islam juga menginginkan seorang khalifah yang ambisius dan kuat. Memahami masalah ini menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khalifah Abdul Malik adalah periode paling menguntungkan bagi Bani Umayyah untuk penaklukan dan pertumbuhan. Begitu juga pada masa pemerintahan putranya Al-Walid. Ini adalah masa penaklukan besar; dan c) Upaya penaklukan berhenti atau hanya mencapai kemenangan yang sangat kecil di luar waktu tersebut. Daulah Umayyah pada waktu itu telah diganggu oleh sejumlah pemberontakan domestik, atau diperintah oleh khalifah dengan kemampuan terbatas, seperti beberapa kali belakangan ini, atau dipimpin oleh khalifah yang lebih berambisi untuk mendapatkan ridha Allah daripada meningkatkan kekuatan mereka sendiri. dan penaklukan, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. (Ahmad, 1990)

Kedua, Sistem Monarki (Kerajaan) Dinasti Umayyah. Tindakan kedua pemerintahan Muslim dalam sejarah adalah munculnya Dinasti Umayyah, yang memimpin sebagai Monarki. Kebangkitan Bani Umayyah tidak hanya menandakan transisi dinasti tetapi juga pembalikan prinsip dan munculnya berbagai elemen baru yang berdampak signifikan pada kemakmuran kerajaan dan kemajuan negara. (K,1996). Fondasi pemerintahan Dinasti Umayyah lebih dari sekedar pergeseran kontrol politik; itu juga memiliki sejumlah konsekuensi, seperti perubahan prinsip panduan dan munculnya pola baru yang berdampak signifikan pada Kekaisaran dan kemajuan umat Islam. Raja-raja Umayyah yang berkuasa kemudian menunjuk seorang penerus ketika Muawiyah mengambil alih kendali, dan para pemimpin agama mengambil sumpah setia di depan raja. Metode pemilihan pemimpin ini bertentangan dengan ide-ide fundamental dan ide-ide perdebatan. Ketika Muawiyah memaksa setiap warganya untuk berjanji setia kepada anaknya sendiri, Yazid, suksesi kepemimpinan turun-temurun didasarkan pada politik, bukan kepentingan atau agama. Muawiyah ingin meniru Kaisar Bizantium dan Monarchiheridetis dari Persia. Dia menyimpulkan semuanya dengan mengatakan, "Saya adalah raja pertama dari segala raja."

Ketiga, Penertiban Administrasi. Dalam mengatur sistem tata kelola negara yang baik, Dinasti Umayyah di awal berdinya yang dipimpin oleh Muawiyyah

melakukan beberapa pembaharuan di bidang administrasi. Ini bertujuan agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik, adapun sistem administrasi antara lain: a) Kantor Surat Menyurat. Badan ini bertugas memantau komunikasi, perintah, wasiat, dan perjanjian kontak kerja antara khalifah dengan para pemimpin regional dan internasional yang masih bersahabat dengan Daulah Islam. Kantor ini berfungsi sebagai titik kontak Khalifah Muawiyah dengan para pemimpin suku yang melapor langsung kepadanya, termasuk gubernur, komandan, hakim, dan pejabat; b) Diwan Al-Khatim (Kantor Stempel). Kantor ini berperan untuk melindungi kerahasiaan dokumen negara. Kantor ini juga berfungsi untuk menghentikan orangorang yang ceroboh memalsukan surat-surat khalifah. Badan ini juga bertindak sebagai penyimpanan catatan negara. Badan ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan zaman, ketika wilayah negara semakin luas dan Khalifah Muawiyah membutuhkan sistem keamanan rahasia yang aman untuk mengawasi para gubernur dan panglima perang yang diangkatnya; c) Diwan Al-Kharraj (Kantor Keuangan). Kantor ini dibangun untuk menangani masalah keuangan. di mana Ghanimah, Jizyah, zakat, dan usyur, terkadang dikenal sebagai pajak dari pedagang, merupakan keseluruhan penerimaan negara. Ada tiga kategori pedagang: Ahli Dhimmi mengenakan biaya 0,5%, Ahli Harb mengenakan biaya 1%, dan pedagang Muslim dikenakan pajak 0,25% dari nilai barang. Jika nilai gabungan ketiga barang tersebut kurang dari 200 dirham, maka barang tersebut tidak dikenakan pajak. Diwan Al-Kharraj pusat di Damaskus akan mengawasi penyimpanan semua dana pemerintah ke Baitul Mal. Kantor Keuangan tidak hanya ditemukan di pusat pemerintahan Damaskus; setiap daerah, termasuk Mesir, Irak, dan lainnya, juga memiliki Diwan Al-Kharraj. Diwan Al-Kharraj bertugas juga untuk menyalurkan keuangan untuk membangun fasilitas seperti jalan, menggaji para tentara, biaya operasional Istana Khalifah dan membangun fasilitas umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada masa itu; d) Kantor Pengawas Perdagangan. Kantor ini berfungsi untuk mengawas, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas perdagangan di pasar, adapun tugas-tugasnya ialah: Mencegah terjadinya penipuan dalam bertransaksi dan memastikan ketepatan timbangan, takaran, dan takaran dagang dalam proses jual beli; Untuk memverifikasi keakuratan, lakukan pemeriksaan titik pada skala pendulum biasa; Mencegah kenaikan harga yang ekstrem dari harga pasar; Mencegah penimbunan dan memaksa para penimbun untuk menjual barangnya; dan Berkoordinasi dengan kantor keuangan untuk mengumpulkan pajak dari para pedagang. (Amaliatulwalidain, 2018)

Keempat, Peningkatan Sistem Militer. Muawiyah I sebagai Khalifah pertama Dinasti Umayyah, karena melihat pengalaman langsung para Khalifah Khulafaur Rasyidin yang dimana Khalifah Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib tewas terbunuh tanpa adanya pengawalan yang terjaga kepada mereka. Muawiyah menggagas stabilitas keamanan kekhalifahan dengan membentuk lembaga keamanan, salah satunya adalah dengan menetapkan ajudan atau pengawal yang bertugas untuk mengorganisir pertemuan dengan khalifah dan menjaga keselamatannya. Etika kerajaan melarang khalifah berurusan dengan orang secara pribadi, sehingga hanya mereka yang mendapat kepercayaan pengawal yang diizinkan masuk ke dalam apartemen istana yang diamankan oleh penjaga. Khalifah juga memiliki ruang pribadi untuk melindungi diri dari serangan langsung. Peran ajudan dapat dibandingkan dengan kepala staf presiden atau dewan kerajaan dalam pemerintahan modern, di mana ajudan dipilih karena dapat diandalkan dan cerdas. Selain itu, Muawiyah mendukung kepolisian yang

bertanggung jawab menjaga keamanan negara, membasmi penjahat dan pelanggar hukum, serta memastikan stabilitas di seluruh wilayah Dinasti Umayyah, baik di ibu kota maupun di daerah lainnya.

b. Bidang Sosial dan Budaya

Dinasti Bani Umayyah mengalami perubahan sosial yang signifikan, salah satunya adalah terbentuknya hubungan komunikasi antara kerajaan-kerajaan Islam di Arab dengan bangsa-bangsa taklukan berperadaban besar seperti Eropa, Persia, dan Mesir, yang mengakibatkan bercampurnya budaya Islam Arab dengan tradisi bangsa lain. Menurut Philip K. Hitti, masyarakat dalam imperium Arab terbagi menjadi empat golongan: anggota istana dan penjajah Arab yang memimpin, kelompok neomuslim, golongan dhimmi yang terdiri dari Nasrani, Yahudi, dan Sabean, serta kelas budak. Pada masa ini, toleransi beragama dijunjung tinggi, dengan non-Muslim menikmati kehidupan yang damai dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Tempat-tempat ibadah seperti gereja, katedral, kuil, dan sinagog dipertahankan oleh para khalifah, dan bahkan dibangun kembali jika rusak. Namun, kehidupan glamour juga mencirikan Dinasti Umayyah, terutama di Damaskus yang menjadi kota terindah dan jantung kerajaan Islam, dihiasi dengan bangunan megah, air mancur, dan rumah mewah. Praktik minum anggur dan hiburan seperti permainan dadu, balapan kuda, dan musik juga menjadi kebiasaan di kalangan khalifah, kecuali Umar bin Abdul Aziz yang hidup sederhana. Selain itu, derajat wanita mengalami peningkatan dengan penghormatan yang tinggi, terutama pada masa Walid II, di mana wanita menikmati kebebasan, mendapat pendidikan, dan mendalami bidang sastra. (Manshur F. M., 2003)

Dinasti Umayyah (661-750 M) menerapkan kebijakan Arabisasi yang berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan tradisi intelektual dalam kekhalifahan. Kondisi sosial tetap stabil, damai, dan adil meskipun sistem pemerintahan tidak bersifat demokratis. Kehidupan umat Islam dari kalangan non Arab berlangsung tanpa hambatan, meskipun bangsa Arab-Muslim memegang kendali atas seluruh kekaisaran. Orang Arab dan non-Arab hidup harmonis dan damai, dengan hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Para khalifah menggunakan dana negara untuk melindungi gereja, katedral, candi, sinagog, dan tempat ibadah lainnya. Selain itu, tempat-tempat peribadatan yang rusak juga diperbaiki dan dibangun kembali (Istighfari & Sudjatnika, 2025).

Arsitektur mengalami perkembangan pesat pada masa Bani Umayyah, terutama setelah Thariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Spanyol. Masjid-masjid yang dibangun pada era ini mencerminkan seni arsitektur yang menggabungkan tradisi Islam dengan budaya lokal. Salah satu contohnya adalah Dome of the Rock (Qubah Ash-Shakhra) di Masjid al-Aqsha, Yerusalem. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz memperbarui bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sementara AlWalid membangun menara-menara di Hijaz dan Suriah, serta mengubah gereja menjadi masjid. Istana-istana kecil dan rumah peristirahatan juga menjadi bagian dari perkembangan arsitektur masa itu (Al-Hafiedz et al., 2024).

Di bidang seni rupa, lukisan dan ukiran dinding pada bangunan semakin berkembang, dengan para seniman yang dikenal sebagai Shawawirun. Dalam seni musik, lagu-lagu pra-Islam seperti nyanyian kemenangan, perang, agama, dan cinta mengalami perkembangan lebih lanjut. Beberapa alat musik yang populer pada masa itu termasuk tabur segi empat (duff), seruling (qashabah), dan suling rumput (zamr). Musisi terkenal dari era ini antara lain Said bin Misjah, Ibnu Surayjsab, dan Ibnu Muhriz (Rachman, 2018).

c. Bidang Ilmu Pengetahuan

Maju dan majunya ilmu pengetahuan di bawah Kedaulatan Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diupayakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dengan bahasa Arab sebagai media utama, dakwah Islamiyah berkembang tanpa hambatan dalam hal pertumbuhan dan perluasan disiplin ilmu. Pertumbuhan ilmu pengetahuan di bawah Dinasti Bani Umayyah antara lain meliputi: 1) Ilmu Qiraat. Keterampilan yang sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin dan merupakan syariat paling awal ini adalah seni membaca Alquran. Abdullah bin Qusair, seorang qiraat terkenal, lahir pada masa Bani Umayyah; 2) Ilmu Tafsir. Pada awal periode Daulah Bani Umayyah, umat Islam membutuhkan peraturan dan hukum yang berdasarkan Al-quran. Alhasil, mereka sangat tertarik dengan berbagai tafsir Alquran. Komentator paling awal dan paling terkenal saat itu adalah Ibnu Abbas; 3) Ilmu Hadits. Di periode ini upaya yang dilakukan untuk menyusun hadis-hadis Nabi, menyelidiki konteks sejarah, dan mengubahnya menjadi disiplin ilmu yang dikenal ilmu hadis. Ulama pada masa ini ialah Al-Auzi Abdurrahman bin Amru, Ibnu Abu Malikah, dan Asya'bi Abu Amru Amir bin Syuhrabil; 4) Ilmu Fiqh. Perkembangan awal ilmu fikih didasarkan pada keharusan adanya kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam memecahkan berbagai persoalan. Fiqih Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hasits.

Di antara para ahli fikih terkemuka adalah Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Kharijah; dan 5) Ilmu Nahwu. Perlunya perluasan wilayah Islam dan prakarsa Arabisasi tata bahasa Arab. Sehingga dapat didokumentasikan dan diakui sebagai salah satu ilmu yang paling penting untuk dikuasai. Abu al-Aswad al-Du'ali, yang berasal dari Bagdad. Al-Du'ail menawarkan jasa pembuatan tata bahasa Arab dengan menambahkan titik pada huruf hijaiyah yang sebelumnya kurang; serta 6) Ilmu Geografi dan Tarikh. Pada titik ini, geografi dan penanggalan telah dipisahkan menjadi bidang studi mereka sendiri. Mereka mengumpulkan kisah-kisah tentang Nabi dan para sahabatnya melalui bentuk tarian mereka, yang mereka gunakan sebagai dasar biografi dan buku-buku penaklukan (maghazi) (sirah). Ekspansi dakwah Islam ke lokasi-lokasi baru yang jauh menjadi katalis bagi terciptanya geografi. (Rachman, 2018).

Selama periode Dinasti Umayyah, pendidikan memiliki karakter desentralisasi, ini berarti bahwa pendidikan tidak lagi terpusat di ibu kota, melainkan berkembang secara mandiri di wilayah-wilayah yang dikuasai seiring dengan perluasan wilayah. Pendidikan belum memiliki tingkatan formal atau standar usia. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan selama masa Dinasti Umayyah masih mengikuti pola yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin, meskipun beberapa perkembangan baru mulai terlihat, khususnya dalam ilmu naqli seperti filsafat dan ilmu-ilmu eksakta. Pada masa tersebut, pengetahuan berkembang dalam tiga bidang utama, yaitu ilmu agama (diniyah), sejarah (tarikh), dan filsafat (Azman, 2016).

Pada periode ini, umat Islam mengalami kemajuan yang pesat, tidak hanya dalam penyebaran agama Islam, tetapi juga dalam berbagai bidang pengetahuan lainnya. Para pemimpin Dinasti Umayyah menyediakan dana khusus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Khalifah menunjuk para ahli untuk bekerja di lembaga-lembaga ilmu seperti masjid, kuttab, dan lembaga lainnya yang didirikan oleh pemerintah (Nur, 2015).

Pengembangan budaya, filsafat, dan ilmu pengetahuan di Damaskus pada masa ini terfokus pada beberapa bidang (Kulsum, 2021) Ilmu Tafsir Setelah

berdirinya Dinasti Umayyah di Damaskus, kebutuhan akan hukum dan peraturan yang bersumber dari al-Qur'an meningkat. Di masa ini, tafsir masih diajarkan secara lisan dan belum dikodifikasi.

Ilmu Hadis Para ahli hadis sering menemui kesulitan saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena banyak hadis yang bukan hadis sahih. Hal ini memicu upaya para muhaddits untuk memeriksa sanad dan riwayat hadis, yang kemudian berkembang menjadi ilmu hadis. Pengumpulan hadis dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dengan Ibnu Az-Zuhri sebagai salah satu ulama pertama yang membukukan hadis atas perintah khalifah. Dalam perjalanan sejarah perkembangan ilmu, ilmu qira'at merupakan salah satu yang pertama berkembang. Ilmu ini memiliki peran yang sangat penting pada masa awal Islam. Orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an dikenal sebagai ahlul qurra. Setelah proses pembukuan dan penyempurnaan Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan proses pembukuan dan penyempurnaan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang telah disahkan kemudian dikirim ke berbagai daerah. Setiap wilayah kemudian mengembangkan dialek bacaan yang khas, mengikuti seorang qori yang bacaannya dianggap sah. Kemudian muncul bacaan yang sekarang dikenal sebagai qiraah sab'ah yang kini ditetapkan menjadi bacaan standar.

Ilmu Nahwu Seiring dengan perkembangan luas wilayah Islam dan upaya Arabisasi, kebutuhan akan ilmu tata bahasa Arab semakin tinggi. Oleh karena itu, ilmu nahwu akhirnya dibukukan dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang penting untuk dipelajari Setelah banyak bangsa non-Arab memeluk Islam dan wilayahnya menjadi bagian dari kekuasaan Islam, kebutuhan untuk menyusun aturan tata bahasa Arab semakin dirasakan oleh bangsa Arab. Cendekiawan pertama yang tercatat dalam sejarah sebagai penyusun ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad al-Dualy yang berasal dari Baghdad. Salah satu kontribusi pentingnya adalah penyusunan tata bahasa Arab, termasuk penambahan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang sebelumnya tidak ada.

Tarikh dan Geografi Pada masa ini, ilmu sejarah (tarikh) dan geografi telah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Dalam mengembangkan ilmu sejarah, para cendekiawan pada masa itu mengumpulkan cerita-cerita mengenai Nabi dan para sahabatnya, yang selanjutnya menjadi dasar penulisan berbagai buku tentang penaklukan (maghazi) dan biografi (sirah). Perkembangan ilmu geografi didorong oleh penyebaran dakwah Islam ke wilayah-wilayah baru yang luas dan jauh. Penulisan sejarah Islam mulai dilakukan saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, dan proses pembukuannya dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah.

Seni Bahasa Minat terhadap puisi Arab pra-Islam kembali muncul, serta penyair-penyair baru mulai bermunculan, seperti Umar bin Abi Rabi' (w. 719 M), Jamil Al-Udhri (w. 701 M), Qays bin Al-Mulawwah (w. 699 M) yang dikenal sebagai Majnun Laila, Al-Farazdaq (w. 732 M), dan Ummu Jarir (w. 792 M). Penyair-penyair ini melestarikan nilai-nilai kemuliaan Badui dan menghasilkan puisi dengan tema spiritual. Al-Akhtal (w. 710 M), seorang Kristen Jacobite, juga terkenal dalam periode ini. Seni dan bahasa mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat Islam secara umum. Kota-kota seperti Basrah dan Kuffah menjadi pusat perkembangan ilmu dan sastra, tempat di mana umat Islam berinteraksi dengan bangsa-bangsa maju dalam hal bahasa dan sastra. Di kota-kota ini, orang-orang Arab mulai menyusun riwayat Arab, seni bahasa, serta ilmu-ilmu seperti sejarah, nahwu, sharaf, dan balaghah. Klub-klub sastra juga bermunculan.

Pada periode ini, terjemahan awal karya-karya filsafat Yunani dari bahasa Suryani ke bahasa Arab mulai dilakukan. Orang-orang ini fokus menerjemahkan buku-buku berbahasa Latin yang berkembang di Yunani ke dalam bahasa Arab. Pembangunan dalam bidang sains dan peradaban ini sebagian besar dipengaruhi oleh budaya dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, terutama dua kekaisaran besar, yaitu Bizantium dan Persia.

B. Pola Interaksi Umat Islam dengan Masyarakat dan Kebudayaan di Wilayah Kekuasaan

Perluasan wilayah Dinasti Umayyah (661–750 M) dari Semenanjung Iberia hingga Transoxiana dan Sind menempatkan umat Islam yang semula didominasi orang Arab di tengah masyarakat dengan pemerintahan, agama, bahasa, dan tradisi yang sudah mapan (Hitti,2025). Kekuasaan di wilayah seluas itu tidak dapat dijalankan dengan kekuatan militer semata. Pola interaksi yang terbentuk dapat dibaca melalui empat konsep, yaitu akomodasi dengan memanfaatkan struktur lama, arabisasi dengan penyeragaman bahasa dan simbol kekuasaan, stratifikasi dengan pembagian kedudukan sosial, dan akulturasi dengan percampuran unsur budaya (Lapidus,2002). Keempatnya berjalan bersamaan dan kadang saling bertentangan. Bagian ini membahas pola tersebut pada bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan keilmuan, lalu menganalisis faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya.

1. Pola Akomodatif dan Adaptif dalam Pemerintahan dan Administrasi

Penguasa Muslim pada umumnya tidak membongkar tatanan lama. Pasukan Arab menempati kota garnisun (*amsar*) seperti Basrah, Kufah, dan Fustat, sementara administrasi lokal tetap dijalankan tenaga setempat (Kannedy,2007). Birokrasi bekas Bizantium dilanjutkan di Syam dan Mesir, sedangkan tradisi Sasaniyah dipertahankan di Irak dan Persia (Lapidus,2002). Pegawai non-Muslim tetap dibutuhkan karena keahliannya dalam perpajakan dan pencatatan. Di pusat, Damaskus membentuk jabatan-jabatan khusus (*katib*) untuk surat-menyurat, keuangan, ketentaraan, keamanan, dan peradilan

Titik baliknya adalah kebijakan Abdul Malik bin Marwan (685–705 M) yang menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi menggantikan Yunani, Pahlavi, dan Koptik, serta mencetak mata uang beraksara Arab (Hitti, 2005) Arabisasi merupakan strategi politik untuk memperkuat kohesi kekuasaan dan identitas Arab-Islam (Ramadhani & Nurzena, 2026). Meski demikian, Alsulami (2025) menunjukkan bahwa peran non-Muslim tidak serta-merta hilang, sehingga hubungan keduanya ditandai ketegangan sekaligus kerja sama.

2. Pola Interaksi Sosial: Stratifikasi dan Koeksistensi

Masyarakat Umayyah terdiri atas tiga lapisan: Muslim Arab, mawali (non-Arab yang masuk Islam), dan *ahl al-dhimmah* (non-Muslim yang dilindungi). Mawali setara dalam akidah, tetapi dalam praktik sering menanggung beban pajak tertentu, menerima tunjangan lebih kecil, dan sulit meraih jabatan strategis. Di sisi lain, mereka memperoleh ruang mobilitas sebagai ulama, pedagang, dan pengrajin (Hawting, 2000). Ketimpangan ini melahirkan ketidakpuasan di Irak dan Khurasan yang kelak dimanfaatkan gerakan Abbasiyah (Yatim, 2008).

Kristen, Yahudi, dan Zoroaster dijamin keamanan jiwa, harta, dan kebebasan beribadah serta mengatur urusan internal komunitasnya dengan imbalan jizyah dan kharaj, namun hak itu disertai pembatasan tertentu (Adegoke, 2017;Al-Khalidi, 2024). Sebagian non-Muslim bahkan berperan di lingkungan istana, seperti keluarga Sarjun bin Mansur dalam urusan keuangan dan Yohanes dari Damaskus sebagai teolog (Alsulami, 2025). Dengan demikian, interaksi tidak selalu bersifat subordinatif, tetapi sering berupa kolaborasi fungsional.

Polanya juga bervariasi antarwilayah. Di Syam dan Mesir, struktur dan tenaga lama dimanfaatkan (Kennedy, 2007). Di Irak, Persia, dan Khurasan, percampuran Arab, Persia, dan mawali disertai kebijakan pajak yang memberatkan, termasuk pada masa Gubernur Nasr bin Sayyar (Rofiqo & Rizal, 2019). Di Afrika Utara, perlakuan diskriminatif terhadap orang Berber memicu pemberontakan sekitar 740 M pada masa Hisyam bin Abdul Malik, sedangkan di Andalusia penduduk Kristen dan Yahudi umumnya dibolehkan mempertahankan agama dan komunitasnya dengan kewajiban pajak (Lapidus, 2002). Di Sind dan Transoxiana, tokoh lokal dipertahankan selama tunduk dan membayar pajak (Kennedy, 2007).

Upaya koreksi dilakukan Umar bin Abdul Aziz (717–720 M) melalui sikap egaliter, penyederhanaan birokrasi, pemilihan pejabat yang lebih cermat, dan penyesuaian beban pajak, termasuk pembebasan jizyah bagi yang memeluk Islam (Rofiqo & Rizal, 2019; Indah dkk., 2025). Reformasi ini singkat dan tidak sepenuhnya diteruskan penerusnya, tetapi menunjukkan upaya menyeimbangkan kepentingan negara dengan nilai kesetaraan.

3. Pola Interaksi Ekonomi

Integrasi wilayah dalam satu sistem pemerintahan membuka pertukaran lintas daerah. Pencetakan dinar dan dirham beraksara Arab memperkuat kedaulatan ekonomi dan memudahkan transaksi (Alsulami, 2025). Jizyah dan kharaj menjadi sumber pendapatan negara sekaligus titik singgung utama dengan non-Muslim dan mawali: ketika adil ia menopang stabilitas, ketika memberatkan ia memicu perlawanan (Rofiqo & Rizal, 2019; Hawting, 2000). Kota seperti Damaskus, Basrah, Kufah, dan Fustat berkembang sebagai simpul perdagangan dan pertukaran gagasan (Azmi & Arbi, 2024), sedangkan pola pertanian lama banyak dipertahankan dengan kewajiban kharaj.

4. Pola Interaksi Budaya dan Seni

Bahasa Arab berkembang dari bahasa suku menjadi bahasa agama, administrasi, dan ilmu. Bertambahnya penutur non-Arab menumbuhkan kebutuhan akan kaidah bahasa dan ketepatan bacaan Al-Qur'an; tradisi menghubungkan dasar tata bahasa dengan Abu al-Aswad al-Du'ali dan penyempurnaan tulisan dengan masa Abdul Malik dan al-Hajjaj (Hitti, 2005). Arabisasi memperkuat integrasi, tetapi dapat menekan kelompok non-Arab (Ramadhani & Nurzena, 2026).

Akulturasi paling terlihat pada arsitektur. Kubah Batu di Yerusalem dan Masjid Agung Damaskus memadukan tradisi Bizantium dan Persia dengan simbol Islam seperti kaligrafi Arab, sedangkan istana gurun seperti Qusayr Amra memperlihatkan pengaruh Hellenistik dan Persia (Safiitri dkk., 2025). Menurut Grabar, seni Islam awal lahir dari bentuk-bentuk Late Antiquity yang diberi makna baru, bukan sekadar peniruan. Dalam sastra, syair Arab menemukan panggung baru di istana dan kota dengan penyair dari berbagai latar, termasuk Kristen (Hitti, 2005), dan berkembang mengikuti dinamika politik serta polemik antarsuku.

5. Pola Interaksi dalam Bidang Keilmuan

Kebutuhan masyarakat yang beragam mendorong ilmu-ilmu keislaman. Pengumpulan hadis menguat, termasuk atas dorongan Umar bin Abdul Aziz, dan kajian tafsir, qira'at, serta fikih berkembang di Madinah, Kufah, dan Basrah. Pembelajaran masih sederhana melalui masjid, halaqah, dan majelis ilmu, tetapi menjadi fondasi institusi pendidikan berikutnya (Safiitri dkk., 2025). Pertemuan dengan tradisi Yunani, Persia, Suryani, dan Koptik membuka jalur transfer pengetahuan (Ramadhani & Nurzena, 2026). Penerjemahan awal dikaitkan dengan Khalid bin Yazid, meskipun cakupannya masih diperdebatkan, dan gerakan penerjemahan berskala besar yang didukung negara baru berlangsung pada masa

Abbasiyah. Masa Umayyah karenanya lebih tepat dipahami sebagai tahap persiapan, yakni penyedia bahasa administrasi, jaringan kota, dan komunitas penerjemah.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat

Interaksi didukung oleh sikap pragmatis-akomodatif terhadap struktur dan tenaga lokal (Alsulami, 2025), bahasa Arab yang menyatukan lintas etnis (Ramadhani & Nurzena, 2026), kota garnisun dan pusat dagang sebagai ruang perjumpaan (Lapidus, 2002), birokrasi pusat yang mulai tertata (Amin, 2018), serta kebijakan berkeadilan pada masa tertentu, terutama Umar bin Abdul Aziz (Rofiqo & Rizal, 2019).

Adapun penghambatnya ialah kebijakan yang mengutamakan Arab sehingga mawali merasa tidak setara (Hawting, 2000), beban dan praktik pajak yang tidak adil (Rofiqo & Rizal, 2019), rivalitas antarsuku Arab (Qais dan Kalb/Yaman) serta oposisi Syiah dan Khawarij (Safiitri dkk., 2025), konflik suksesi dan gaya hidup elite yang menggerus legitimasi moral (Suntiah & Maslani, 2017), dan luasnya wilayah yang menyulitkan kendali pusat.

7. Analisis dan Dampak

Pola interaksi Umayyah merupakan kombinasi akomodasi dan sentralisasi: keahlian lokal dimanfaatkan agar pemerintahan efektif, sementara bahasa, mata uang, dan arsitektur Arab-Islam ditanamkan untuk menyatukan wilayah yang beragam. Dampaknya meliputi terbentuknya masyarakat Muslim multietnis, meski kesetaraan Arab dan non-Arab belum terwujud; kerangka kebahasaan dan administrasi Arab yang kelak dipertahankan Abbasiyah; corak khas seni dan arsitektur Islam; dasar bagi perkembangan ilmu pada abad berikutnya dan ketimpangan terhadap mawali serta ketegangan fiskal yang ikut menyiapkan runtuhnya Umayyah pada 750 M (Yatim, 2008). Di Andalusia, Abdurrahman I mendirikan pemerintahan baru pada 756 M yang menjadi pusat peradaban penting.

Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa berdirinya Dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus menandai titik balik besar dalam sejarah peradaban Islam, ditandai dengan peralihan sistem pemerintahan dari model demokrasi (Khulafaur Rasyidin) menjadi sistem monarki (kerajaan) turun-temurun. Di bawah kepemimpinan para khalifahnya, Dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya melalui perluasan wilayah (ekspansi) yang masif, penertiban tata kelola administrasi negara melalui pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti *Diwan*, serta penguatan sistem keamanan dan militer untuk menjaga stabilitas kekaisaran.

Selain itu, di bidang sosial-budaya dan ilmu pengetahuan, masa ini diwarnai oleh proses akulturasi budaya dengan bangsa-bangsa taklukan, penerapan kebijakan Arabisasi, serta pesatnya kemajuan berbagai disiplin ilmu keislaman seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, hingga tarikh dan geografi. Perkembangan tersebut didukung penuh oleh kebijakan pemerintah dan penyediaan fasilitas serta dana khusus dari para khalifah, sehingga berhasil meletakkan fondasi intelektual dan peradaban Islam yang kokoh bagi generasi selanjutnya.

Serta Interaksi umat Islam dengan masyarakat dan kebudayaan di wilayah Umayyah berlangsung secara akomodatif-adaptif dalam pemerintahan, stratifikatif dalam bidang sosial, integratif dalam ekonomi, serta akulturatif dalam budaya dan keilmuan. Interaksi tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai toleransi atau dominasi, melainkan negosiasi dinamis antara kepentingan kekuasaan, identitas keagamaan, dan realitas budaya setempat. Proses ini meletakkan fondasi institusional dan kultural bagi peradaban

Islam berikutnya, sekaligus menyisakan ketegangan terkait mawali dan beban fiskal yang berkontribusi pada berakhirnya dinasti ini.

References

Abd Rahman, F. (2005). Political, social and religious changes in Islamicjerusalem from the first Muslim conquest to the end of Umayyad period (637–750 CE). Journal of Islamicjerusalem Studies, 6(1), 109–166. https://izlik.org/JA99GU79UD

Adegoke, K. A. (2017). Ahl adh-dhimmah under Umayyad and Abbasid caliphates. Ad-Dirayah: International Journal of Islamic Studies. https://ir.unilag.edu.ng/handle/123456789/7858

Alajmi, A. (2011). The Umayyads. Oxford Bibliographies in Islamic Studies. https://doi.org/10.1093/obo/9780195390155-0151

Al-Hafiedz, A., et al. (2024). Sejarah peradaban Dinasti Umayyah yang membangun jembatan peradaban Islam. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc

Amaliatulwalidain. (2018). Prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian pada masa pemerintahan Islam: Muawiyah bin Abu Sufyan 661–680 M). https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/download/672/823/2064

Azman, Z. (2016). Pendidikan pada zaman Bani Umayyah. https://scholar.google.com/scholar?q=Pendidikan+pada+zaman+Bani+Umayyah+Azman

Azmi, N., & Arbi, A. (2024). Wujud kemajuan peradaban Islam dalam situasi sosial politik pada masa Dinasti Bani Umayyah. Jurnal Pendidikan Tambusai. https://jptam.org/index.php/jptam

Hawting, G. R. (2000). The first dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750 (2nd ed.). Routledge. https://books.google.com/books?q=The+First+Dynasty+of+Islam+Hawting

Hitti, P. K. (2005). History of the Arabs. Serambi Ilmu Semesta. https://scholar.google.com/scholar?q=Philip+K.+Hitti+History+of+the+Arabs+2005

Indah, M., Gaffar, A. A., & Siradjuddin, S. (2025). Sistem ekonomi Bani Umayyah: Perkembangan dan pengaruhnya terhadap perekonomian Islam. AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 5(2), 345–361. https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6826

Judd, S. C. (2016). Umayyad Caliphate. In N. Dalziel & J. M. MacKenzie (Eds.), The encyclopedia of empire. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118455074.wbeoe178

Kennedy, H. (2007). The great Arab conquests: How the spread of Islam changed the world we live in. Da Capo Press. https://books.google.com/books?q=Hugh+Kennedy+The+Great+Arab+Conquests

Kulsum, U. (2021). Sejarah peradaban Islam klasik dan pertengahan. Duta Media Publishing. https://repository.uinmadura.ac.id/763/

Lapidus, I. M. (2002). A history of Islamic societies (2nd ed.). Cambridge University Press. https://books.google.com/books?q=Ira+Lapidus+A+History+of+Islamic+Societies

Nasution, H. (1999). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. UI Press. https://scholar.google.com/scholar?q=Harun+Nasution+Islam+Ditinjau+dari+Berbagai+Aspeknya

Nur, M. (2015). Pemerintahan Islam masa Daulat Bani Umayyah (Pembentukan, kemajuan dan kemunduran). Jurnal Pusaka. https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/141

Nurhasan. (2006). Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Dinasti Umayyah (41–132 H/661–750 M). Buletin Al-Turas, 12(2), 163–173. https://doi.org/10.15408/bat.v12i2.4233

Nurhakim, M. (2003). Sejarah dan peradaban Islam. UMM Press. https://scholar.google.com/scholar?q=Moh+Nurhakim+Sejarah+dan+Peradaban+Islam+2003

Rachman, T. (2018). Bani Umayyah dilihat dari tiga fase (Fase terbentuk, kejayaan dan kemunduran). JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 2(1), 86–98. https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1079

Thohir, A. (2004). Perkembangan peradaban di kawasan dunia Islam: Melacak akar-akar sejarah, sosial, politik, dan budaya umat Islam. RajaGrafindo Persada. https://scholar.google.com/scholar?q=Ajid+Thohir+Perkembangan+Peradaban+di+Kawasan+Dunia+Islam

Yatim, B. (2008). Sejarah peradaban Islam. RajaGrafindo Persada. https://scholar.google.com/scholar?q=Badri+Yatim+Sejarah+Peradaban+Islam